

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 3 No. 3. Maret 2024

**PROBLEMATIKA MEWUJUDKAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI
SOSIAL DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SUNGAI
PENUH**

Mufti Zevira

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang

Email: muftizevira87@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan problematika mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh berdasarkan aspek connectivity, aspek content, dan aspek human. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa problematika mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial berdasarkan ketiga aspek yaitu (1) aspek Connectivity: belum tersedianya fasilitas sarana prasarana penyandang disabilitas; akses penggunaan wifi yang belum merata; upaya menjangkau pemustaka belum terlaksana secara efektif dan sistem penelusuran bahan pustaka OPAC yang tidak berfungsi dengan baik. (2) aspek Content: belum tersedianya koleksi untuk penyandang disabilitas; dan sosialisasi perpustakaan kepada masyarakat belum dilaksanakan secara menyeluruh. (3) aspek Human: masyarakat yang kurang merespon; keterbatasan anggaran; kurangnya pemanfaatan aplikasi perpustakaan digital iSungaiPenuh dan belum meluasnya jaringan kemitraan dengan berbagai pihak. Upaya yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh dalam mengatasi hambatan yaitu dengan menjalin kemitraan.

Kata Kunci: Problematika, Inklusi Sosial, Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Abstract

This study aims to describe the problems of realizing a social inclusion-based library at the Sungai Penuh City Library and Archives Office based on connectivity, content, and human aspects. This type of research is qualitative research using descriptive methods. Data collection techniques are carried out by interview, observation and documentation methods. Data analysis techniques are carried out in three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the research conducted, it shows that the problem of realizing a social inclusion-based library based on the three aspects, namely (1) Connectivity aspect: unavailability of infrastructure facilities for people with disabilities; uneven access to wifi usage; efforts to reach out to users have not been carried out effectively and the OPAC library material search system is not functioning properly. (2) Content aspect: the unavailability of collections for people

with disabilities; and library socialization to the community has not been carried out thoroughly. (3) Human aspect: lack of public response; budget constraints; lack of utilization of the iSungaiPenuh digital library application and the lack of widespread partnership networks with various parties. Efforts made by the Library and Archives Office of Sungai Penuh City in overcoming obstacles are by establishing partnerships.

Keywords: *Problematika, Inklusi Sosial, Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.*

PENDAHULUAN

Perkembangan perpustakaan umum saat ini bukan hanya dituntut sebagai tempat untuk menyediakan informasi dari bahan perpustakaan saja melainkan sebagai lembaga yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas hidup mereka. Perpustakaan juga menyuguhkan berbagai kegiatan interaktif untuk seluruh lapisan masyarakat sebagai proses pembelajaran sepanjang hayat. Perpustakaan merupakan tempat yang cocok dalam proses pembelajaran sepanjang hayat karena memberikan akses ruang informasi dan komunitas secara gratis tanpa memandang status sosial, fisik, dan lainnya.

Hal tersebut sejalan dengan UU No. 43 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Perpustakaan yang mencakup perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang dilaksanakan untuk proses pembelajaran sepanjang hayat oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang rentan terkecuali seperti kaum penyandang disabilitas, masyarakat dari wilayah terpencil hingga masyarakat lansia, serta tanpa membedakan status sosial. Pasal 5 menjelaskan bahwa terdapat 3 poin wewenang masyarakat pada perpustakaan, yaitu: (1) masyarakat mempunyai kewenangan yang setara untuk mendapatkan sarana dan prasarana perpustakaan; (2) masyarakat yang tinggal di daerah jauh dari jangkauan perpustakaan umum, berwenang untuk mendapatkan perpustakaan khusus; (3) masyarakat kaum penyandang disabilitas, berwenang untuk mendapatkan sarana dan prasarana 2 perpustakaan sesuai dengan keterbatasan mereka. Sehingga, dengan adanya pernyataan tersebut secara perlahan mengubah persepsi masyarakat mengenai perpustakaan yang dulunya hanya sebagai tempat pajangan buku berubah menjadi fasilitator untuk meningkatkan potensi diri dengan pembelajaran sepanjang hayat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mallawa (2019) pembelajaran sepanjang hayat ialah fundamental ketika mewujudkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (Susilo, 2021).

Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan terobosan dari Perpustakaan Nasional dan BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) yang diresmikan di tahun 2018. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial mulai dilaksanakan di tahun 2019 (Kementerian PPN/Bappenas, 2018). Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ialah strategi dari perpustakaan yang memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, fisik, dan perbedaan lainnya untuk mengembangkan kualitas diri agar dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat yang mana masyarakat terlibat secara langsung ketika melaksanakan kegiatannya (Rachman, dkk, 2019). Adapun yang mendasari keterlibatan perpustakaan dalam inklusi sosial karena perpustakaan membangun kegiatan dan komunitas yang berkelanjutan (Sarkar, 2020). Sehingga perpustakaan berpusat pada konsep inklusi sosial.

Di Indonesia sendiri, konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial masih menjadi tendensi baru dalam pengembangan perpustakaan saat ini. Hal ini merupakan topik yang

sedang hangat dan perlu diperhatikan lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti terkait topik ini. Perpustakaan berbasis inklusi sosial di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan pada akhirnya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Konsep inklusi sosial pertama kali diterapkan dalam perpustakaan pada tahun 1999 di Inggris oleh Departement of Culture, Media, and Sport (DCMS). Tujuan dari konsep ini adalah untuk memberdayakan individu atau kelompok minoritas yang terisolasi atau terdiskriminasi dalam lingkungan sosial karena perbedaan yang mereka miliki dengan mayoritas masyarakat. Inklusi sosial bertujuan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan apapun agar dapat terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat serta memperoleh perlakuan yang sama dan setara dalam pemenuhan hak sebagai masyarakat (Lambert, 2020). Pada dasarnya, inklusi sosial tidak selalu tentang individu sebagai partisipan pasif yang hanya diam memperhatikan, melainkan sebagai individu yang juga membawa dampak positif dengan responsif dan mau menerima perubahan yang di dalamnya terdapat kerjasama dan manfaat serta memperlakukan setiap masyarakat dengan seadil-adilnya (Vyrastekova, 2021; Van, dkk, 2023; Faoziah, 2023). Prinsip inklusi sosial ini dinilai cocok untuk perpustakaan, karena perpustakaan berperan sebagai institusi yang menyelenggarakan akses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, informasi serta teknologi secara gratis tanpa memandang suatu perbedaan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh merupakan perpustakaan umum yang berada di pusat Kota Sungai Penuh. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh ini telah bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial sejak tahun 2022. Hal ini berdasarkan observasi awal dengan terjun langsung ke lapangan yang dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2023 dan juga melihat melalui akun Instagram perpustakaan yang bernama @perpustakaan_sungaipenuh, dimana terdapat foto-foto kegiatan pelatihan yang melibatkan masyarakat dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Berdasarkan wawancara observasi awal, terdapat beberapa kegiatan atau program perpustakaan berbasis inklusi sosial seperti, pelatihan membuat konektor masker hijab, memasak basreng, senam aerobik dan wisata edukasi untuk anak TK dan SD lingkup Kota Sungai Penuh. Selanjutnya, pada tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh menaungi 3 Perpustakaan Desa yang ada di Kota Sungai Penuh. Perpustakaan Desa tersebut meliputi, Perpustakaan Desa Tanjung di Kecamatan Rawang, Perpustakaan Desa Talang Lindung di Kecamatan Sungai Bungkal dan Perpustakaan Desa Seberang di Kecamatan Pesisir Bukit.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh dalam penyediaan fasilitas sarana prasarana ada yang belum mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Mengingat konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial ialah merangkul seluruh lapisan masyarakat. Ditambah lagi, kurangnya minat masyarakat untuk mendukung kegiatan inklusi sosial dilihat dari masyarakat yang mengikuti kegiatan inklusi sosial sedikit dan itu-itu saja.

Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh dari pustakawan terdapat 15.930 dalam kurun waktu satu tahun masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan. Namun, masih terdapat beberapa masyarakat yang tidak mengetahui adanya program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan lembaga yang secara proaktif membantu individu dan masyarakat dalam

mengembangkan keterampilan, meningkatkan kepercayaan diri, serta memperluas jejaring sosial.

Maka berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Problematika Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh” untuk mengkaji lebih dalam mengenai problematika apa saja yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh dalam mewujudkan konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui informasi yang dihimpun lewat wawancara dan observasi, masalah yang diteliti yaitu problematika mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi data. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan problematika mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh berdasarkan aspek *connectivity*, aspek *content*, dan aspek *human*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aspek *Connectivity*

Aspek *connectivity* merupakan segala hal yang berkaitan dengan pengoptimalan infrastruktur perpustakaan agar memudahkan masyarakat dalam mengakses ilmu pengetahuan.

1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

a. Lokasi

Berdasarkan aturan SNP (Standar Nasional Perpustakaan) Kabupaten/Kota No. 8 tahun 2017 mengenai lokasi perpustakaan harus strategis agar mudah dijangkau masyarakat. Lokasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh berada di lokasi yang strategis. Lokasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh berada di tengah Kota Sungai Penuh dan saling berdekatan dengan sarana fasilitas pendidikan mulai dari SMP Negeri 8 Sungai Penuh dan SMA Negeri 1 Sungai Penuh.

b. Gedung

Berdasarkan aturan SNP (Standar Nasional Perpustakaan) Kabupaten/Kota No. 8 tahun 2017, yang menyatakan bahwa luas gedung perpustakaan sekurang-kurangnya 0,008 m² per kapita dan bersifat permanen, yang mendukung pembangunan fisik yang berkelanjutan. Gedung tersebut memenuhi standar konstruksi, teknologi, kenyamanan, keamanan, kesehatan, kelengkapan, estetika, efektivitas, dan efisiensi. Dalam hal ini gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh sudah memenuhi SNP. Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh memiliki ukuran luas 1440 m² dengan luas tanah 3163 m². Dalam hal ini, gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh sudah mampu untuk memenuhi berbagai aktivitas dan kegiatan terkait perpustakaan berbasis inklusi sosial.

c. Fasilitas Perpustakaan

Menurut aturan SNP (Standar Nasional Perpustakaan) Kabupaten/Kota No. 8 tahun 2017, ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan pengelola yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik; setiap perpustakaan wajib memiliki sarana ruang penyimpanan koleksi, akses informasi, dan sarana pelayanan perpustakaan; sarana ruang penyimpanan koleksi paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki. Berdasarkan aturan SNP, fasilitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh memang sudah sesuai dengan kriteria sebelumnya.

Namun, untuk mendukung konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh belum memenuhi kriteria tersebut. Berdasarkan RKP 2019: Arah Kebijakan Pembangunan Perpustakaan, mengenai Pengembangan Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, perpustakaan harus melakukan pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Hal ini dikarenakan belum tersedianya fasilitas sarana prasarana untuk penyandang disabilitas dan akses *wifi* yang belum merata.

2. Upaya Perpustakaan dalam Menjangkau Pemustaka

Untuk menjaga kredibilitas perpustakaan dan program-programnya diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak (Isrowiyanti, 2014).

a. Melibatkan 3 (Tiga) Perpustakaan Desa di Lingkup Kota Sungai Penuh

Adapun tiga desa yang terlibat yaitu: (1) Perpustakaan Desa Tanjung, Kecamatan Rawang; (2) Perpustakaan Desa Talang Lindung, Kecamatan Sungai Bungkal; dan (3) Perpustakaan Desa Seberang, Kecamatan Pesisir Bukit.

b. Membuat Kegiatan yang Berkaitan dengan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh memiliki empat kegiatan terkait perpustakaan berbasis inklusi sosial, yaitu: (1) pelatihan pembuatan konektor masker hijab; (2) pelatihan memasak basreng; (3) Gambar. 3 Kegiatan Pelibatan Tiga Desa senam aerobik; dan (4) wisata edukasi anak TK dan SD lingkup Kota Sungai Penuh.

c. Promosi Melalui Media Sosial Instagram

Promosi perpustakaan adalah kegiatan untuk mengenalkan seluruh kegiatan yang ada di perpustakaan baik mulai dari layanan, koleksi, fasilitas maupun produkproduk yang ada di perpustakaan dengan tujuan agar masyarakat dapat dengan mudah mengenal dan memanfaatkan seluruh pelayanan dan fasilitas yang ada (Supriyatno, 2019). Di era digital saat ini, promosi melalui media sosial merupakan langkah yang tepat, mengingat tingginya pengguna media sosial.

d. Penyebaran Brosur

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh hanya memberikan brosur kepada pemustaka yang melakukan observasi dan penelitian. Namun, jika pemustaka tidak meminta brosur, maka pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh tidak memberikan. Dalam hal ini, penyebaran brosur yang dilakukan pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh belum merata.

3. Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Karena sudah bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh memiliki sejumlah program kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang ditujukan untuk masyarakat luas. Program ini bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan potensi mereka secara penuh guna memajukan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari: (1) pelatihan

membuat konektor masker hijab; (2) pelatihan memasak basreng; (3) wisata edukasi anak tk dan sd di lingkup kota sungai penuh; dan (4) senam aerobik.

4. Sistem Penelusuran Bahan Pustaka

OPAC yang disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh berasal dari aplikasi INLISLite. Berdasarkan hasil penelitian sistem penelusuran bahan pustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh tidak dalam kondisi baik. Hal ini dikarenakan server kabel yang rusak.

B. Aspek Content

Aspek *content* mengacu pada kualitas dari sumber koleksi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

1. Koleksi Bahan Pustaka dalam Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, disebutkan dalam Pasal 5 Nomor 3 bahwa kewajiban perpustakaan adalah memberikan layanan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan/kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan sosial dan disesuaikan dengan keterbatasan masing-masing masyarakat tersebut.

Jenis koleksi yang disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh terdiri dari koleksi tercetak dan koleksi non cetak. Koleksi cetak yang disediakan terdiri dari koleksi fiksi, non fiksi, deposit, referensi, dan skripsi. Sementara, koleksi non cetak terdiri dari CD dan *E-Book*. Namun, belum memiliki koleksi untuk penyandang disabilitas. Koleksi untuk penyandang disabilitas

2. Sistem Pengadaan Bahan Pustaka

Pengadaan bahan pustaka proses melestarikan dan mengembangkan bahan pustaka. Pengadaan bahan pustaka yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh melalui pembelian dan sumbangan atau hibah.

3. Sistem Pengolahan Bahan Pustaka

Suwarno (2011) menyatakan bahwa pengolahan bahan pustaka adalah proses persiapan bahan pustaka agar dapat digunakan di perpustakaan. Proses pengolahan bahan pustaka pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh menggunakan aturan DDC dan sudah berbasis digital menggunakan aplikasi INLISLite. Sistem automasi perpustakaan seperti INLISLite merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan oleh perpustakaan mendukung segala kegiatan perpustakaan dan membantu tenaga perpustakaan dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

4. Sosialisasi Perpustakaan dalam Kegiatan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Untuk meningkatkan pemanfaatan perpustakaan berbasis inklusi sosial secara produktif, diperlukan kegiatan sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat, serta edukasi yang terus-menerus bagi pengelola perpustakaan. Sosialisasi yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh, meliputi: (1) sosialisasi ke desa; dan (2) mengadakan *workshop*.

C. Aspek Human

1. Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan menunjukkan kualitas dari kegiatan itu sendiri (Ardianto, 2022). Keberhasilan penerapan perpustakaan berbasis inklusi sosial dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan mendukung keberlangsungan perpustakaan tersebut. Pada awal penerapan perpustakaan berbasis inklusi sosial masyarakat antusias dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Seiring

berjalannya waktu, antusias masyarakat menurun. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti, latar belakang pekerjaan masyarakat dan kesadaran masyarakat masih rendah.

2. Dampak dalam Pelaksanaan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Menurut Qomaria (2015), dampak dalam suatu pelaksanaan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan. Dampak dalam suatu pelaksanaan dapat berupa positif dan negatif. Dalam pelaksanaan perpustakaan berbasis inklusi sosial diharapkan dapat berdampak positif untuk masyarakat sekitar. dampak dalam pelaksanaan perpustakaan berbasis inklusi sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh ialah berdampak positif. Hal ini berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dengan adanya penerapan perpustakaan berbasis inklusi sosial, jumlah kunjungan pemustaka bertambah dan berubahnya cara pandang masyarakat yang selama ini menganggap perpustakaan hanya sebagai gudang buku.

3. Kendala dalam Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh memiliki beberapa hambatan dalam mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial, yaitu: (1) keterbatasan anggaran dana; (2) masyarakat yang kurang merespon kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial; dan (3) kurangnya pemanfaatan aplikasi *isungaipenuh*.

4. Upaya Perpustakaan Mengatasi Kendala

Adapun upaya yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh dalam mengatasi kendala yaitu dengan menjalin kemitraan. Dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh berupaya untuk mengatasi kendala dana dengan menjalin kemitraan dengan desa, pengelola perpustakaan desa, karang taruna, serta pihak penyelenggara seminar atau pelatihan. Bentuk kemitraannya berupa dukungan seperti sumber literasi, seminar/pelatihan dan promosi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa problematika mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh dilihat dari aspek teori perpustakaan berbasis inklusi sosial menurut Haryanti (2019) yaitu; aspek connectivity, aspek content, dan aspek human.

Berdasarkan aspek connectivity terlihat bahwasannya fasilitas sarana prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh belum mendukung konsep inklusi sosial, seperti: belum tersedianya fasilitas sarana prasarana untuk kaum penyandang disabilitas; akses penggunaan wifi yang belum merata untuk pemustaka; upaya menjangkau pemustaka yang belum efektif; dan sistem penelusuran bahan pustaka OPAC yang tidak dapat berfungsi dengan baik.

Berdasarkan aspek content terlihat bahwasannya koleksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh kurang mendukung konsep inklusi sosial, seperti: belum tersedianya koleksi khusus untuk penyandang disabilitas; dan sosialisasi perpustakaan ke masyarakat belum dilaksanakan secara menyeluruh. Berdasarkan aspek human terlihat bahwasannya SDM kurang mendukung konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial, seperti: masyarakat kurang merespon terkait adanya kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial; keterbatasan anggaran dana; dan belum meluasnya jaringan kemitraan dengan berbagai pihak.

BIBLIOGRAFI

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak. 9.
- Faoziah, S. (2023). Inklusi Sosial dalam Perspektif Keislaman: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial untuk Semua. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 5(1), 51.
- Haryanti, W. T. (2019). Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. *In Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*. 2(2). 115- 116.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2018). Siaran Pers Seminar Nasional Literasi dan Pembangunan Sosial-Ekonomi. Diakses pada 7 November 2023. <https://bappenas.go.id/berita/9-seminar-nasional-literasi-danpembangunan-sosial-ekonomi>
- Lambert, S. R. (2020). Do MOOCs Contribute to Student Equity and Social Inclusion? A systematic review 2014–18. *Journal of Elsevier: Computers & Education*, 3.
- Perpustakaan Nasional RI. (2017). Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Kepustakawanan Berbasis Inklusi Sosial.
- Perpustakaan Nasional RI. (2019). Hak Masyarakat Terhadap Layanan Perpustakaan.
- Rachman, R. A., dkk (2019). Strategi Sukses Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial untuk Masyarakat Sejahtera (studi pada Perpustakaan Desa Gampingan Gemar Membaca Malang). *In Seminar Nasional MACOM III Universitas Padjadjaran*. 908.
- Susilo, H. (2021). Identifikasi Kebutuhan Layanan Perpustakaan Sains dan Teknologi Nuklir Berbasis Inklusi sosial. *Jurnal Pustakawan Indonesia*, 20(2), 61.
- Van, W. M., dkk. (2023). Social Inclusion, Social Exclusion, and The Role Of Leaders in Avoiding—Or Promoting—Societal Collapse. *Public Administration Review*, 83(3), 699.
- Vyrastekova, J. (2021). Social Inclusion of Students with Special Educational Needs Assessed by The Inclusion of Other in The Self Scale. *PloS one*, 16(4), 4. e0250070.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.